

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**I Putu Irvan¹
Ni Luh Karmini²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: irvan_iputu@yahoo.co.id/ telp: +62 81 337 674 082

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Adanya desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya serta membuat kebijakan yang dapat menunjang potensi-potensi di daerahnya. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2007-2013, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis*. Hasil analisis menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Indonesia's economic development is highly dependent on local economic development. Fiscal decentralization give flexibility to local governments in regulating their regions and create policies that can support the potential in the region. The research objectives: 1) To analyze the influence of local revenues and equalization funds to economic growth, 2) To analyze the effect of local revenues and fund balance on economic growth through capital expenditures. This research was conducted in all districts / municipalities in the province of Bali. Data collection is done through the documents contained in the BPS. The data used in this research is secondary data of years 2007-2013, while the analytical technique used is the analysis of the path or path analysis. The analysis showed local revenues and equalization funds have a positive and significant direct effect on capital spending. The original income of the region and the balance funds have positive direct and significant effect on economic growth but capital spending has a direct effect of negative and not significant to the economic growth.

Keywords: *Regional Income, Balance Fund, Capital Expenditures, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Suliswanto, 2010). Pemerintah daerah berhak untuk mengatur sendiri keuangan daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Hal ini diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Dimana dalam pasal ini menekankan kewenangan daerah secara luas untuk mengatur sumber – sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kemampuan/potensi daerah atau sering disebut otonomi daerah.

Salah satu alasan dibentuknya otonomi daerah adalah daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya sehingga pembangunan di pusat dapat berjalan seimbang dengan pembangunan di daerah. Otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun daerahnya sendiri. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya serta membuat kebijakan yang dapat menunjang potensi-potensi di daerahnya. Pembentukan desentralisasi fiskal ini bertujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah mengelola daerahnya dan mengurangi subsidi pemerintah, serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal semua daerah yang ada di Indonesia terus menerus melakukan

pembangunan dan membuat kebijakan agar dapat meningkatkan pembangunan daerahnya.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan moneter, agama (Suparmoko, 2002:17). Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu pertama sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan atau sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua keuangan daerah yang dikelola dengan baik, dimana dapat menggali sumber pendapatan daerah dan mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga teknologi yang memadai, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal sangat diperlukannya teknologi yang memadai guna menunjang pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang dibuat. Keempat manajemen yang baik dalam mengelola daerah serta menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kaho, 2001:60).

Pemberian otonomi daerah sangatlah berpengaruh bagi pertumbuhan daerah Menurut Subandi (2008: 133) Pembangunan daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat mengelola sumber daya atau potensi yang ada di daerahnya masing-masing, dan membentuk kerjasama dengan sektor swasta sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat merangsang perkembangan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Adanya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dengan peran pemerintah dengan program-programnya yang ingin mensejahterakan rakyat. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerah masing-masing. Kebebasan pemerintah daerah dalam hal merencanakan keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan untuk menunjang kemajuan daerah, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang di perlukan. Dalam perencanaannya belanja daerah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam tahun tertentu yang di rancang dan di setuju bersama dengan DPRD. APBD terdiri dari pendapatan daerah , belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam menjalankan desentralisasi pemerintah daerah sering kali mengalami kekurangan dalam APBD. Hal ini disebabkan tidak seimbang nya penerimaan daerah dan dana belanja daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan publik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberika dana perimbangan. Dana perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Selain bertujuan untuk menambah APBD dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Sering kali dalam proporsi dana alokasi umum lebih tinggi dari penerimaan daerah, bahkan di beberapa daerah sangat kekurangan anggaran sehingga di berikan

dana alokasi khusus. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Tujuan pemerintah pusat dan daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat melakukan meningkatkan infrastruktur yang memadai. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif untuk meningkatkan kemandirian daerah .

Berdasarkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana prasarana. Peranan pemerintah pada tahap menengah tetap besar karena peranan swasta banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak serta kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pertumbuhan

ekonomi meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Wagner dalam Mahyuddin, 2009), dimana analogi untuk Hukum Wagner ini adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan penyediaan barang publik juga akan meningkat sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui penerimaan pemerintah yang pada akhirnya pengeluaran pemerintah juga akan meningkat atau dapat diartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan mencerminkan besarnya dana pengeluaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan layanan jasa pemerintah.

Konsep tersebut dikatakan oleh Wagner sebagai berikut: *'as per capita in-come rises in industrialising nations, their public sectors will grow in relative importance'* (Peters, 2011: 5). Teori tersebut didukung oleh Peacock dan Wiseman: "bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP (*Gross National Product*) menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar" (Mangkoe-soebroto, 1993: 173). Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Peters, 2011: 6). Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta transfer dari pusat.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, sehingga besar kecilnya peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada laju pertumbuhan kabupaten/kota akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Tabel 1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2013

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
Jembrana	5.11	5.05	4.98	4.57	5.61	5.09	5.38	5.11
Tabanan	5.76	5.22	5.44	5.68	5.82	5.91	6.03	5.71
Badung	6.85	6.91	6.39	6.68	6.69	7.03	6.41	6.71
Gianyar	5.89	5.90	5.93	6.04	8.76	6.79	6.43	6.53
Klungkung	5.54	5.07	4.92	5.43	5.81	6.03	5.71	5.20
Bangli	4.48	4.02	5.71	4.97	5.84	5.99	5.61	5.23
Karangasem	5.20	5.07	5.01	5.09	5.19	5.73	5.81	5.30
Buleleng	5.82	5.84	6.01	5.85	6.11	6.52	6.71	6.12
Denpasar	6.60	6.83	6.53	6.57	6.77	7.18	6.54	6.72
Bali	5.92	5.97	5.33	5.83	6.49	6.65	6.05	6.03

Sumber: BPS Provinsi Bali, (2014)

Dalam Tabel 1 kabupaten yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Kabupaten Jembrana yang hanya 5,29 persen, berbanding jauh dengan Kota Denpasar yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 6,72 persen. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang hampir sama dengan selisih 0,01 persen, dimana Kabupaten Badung lebih rendah dibandingkan Kota Denpasar. Kabupaten Badung, Gianyar, dan Buleleng serta Kota Denpasar memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Daerah dalam meningkatkan pertumbuhannya dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan keuangan, baik dari segi pendapatan dan pengeluarannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi merupakan tujuan dari masing-masing pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan PAD yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil mengelola potensi-potensi daerah oleh pemerintah daerah. PAD berasal dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD suatu daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

PAD sangat tergantung pada jumlah dan macam-macam objek pajak maupun retribusi daerah. Setiap pemerintah daerah bebas dalam menentukan tarif pajak maupun retribusi daerahnya dengan tetap berpedoman kepada undang-undang sebagai batas maksimum dari tarif pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengidentifikasi potensi-potensi dalam yang ada di daerahnya. Perekonomian suatu daerah sangat tergantung kepada pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka perekonomian daerah tersebut semakin tinggi.

Belanja daerah dan PAD memiliki hubungan yang erat. Besar kecilnya PAD akan membantu dalam menunjang belanja daerah. Belanja daerah kemudian dialokasikan untuk belanja modal dengan porsi yang semakin besar guna menambah

sarana prasarana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan yang ada (BPS Provinsi Bali, 2014).

Tabel 2.
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2013

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jembrana	81.88	91.51	100.67	58.16	67.49	134.61	142.56
Tabanan	57.98	64.75	77.33	107.91	70.44	138.72	128.19
Badung	209.54	482.47	445.01	176.30	199.70	627.71	766.71
Gianyar	89.84	98.58	160.25	109.96	124.15	120.63	185.32
Klungkung	89.88	63.51	82.51	42.56	49.01	81.22	64.09
Bangli	86.16	85.21	48.31	68.61	114.69	82.34	62.76
Karangasem	95.36	152.44	141.78	77.51	118.84	171.63	108.74
Buleleng	85.63	85.20	102.44	47.21	121.90	79.43	185.90
Denpasar	73.35	66.11	88.38	65.76	88.77	206.14	254.01
Rata - Rata	96.62	132.20	138.52	83.78	106.11	182.49	210.92

Sumber: BPS Provinsi Bali, (2014)

Pada Tabel 2 rata – rata alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, namun pada tahun 2010 alokasi belanja modal menurun dan kembali mengalami kenaikan untuk tahun berikutnya. Menurunnya alokasi belanja modal ini tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. PAD menarik untuk diteliti karena PAD tiap daerah berbeda-beda, selain itu belanja modal yang dilakukan pemerintah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya PAD dan belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lin dan Liu pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan Wong (2004)

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sebenarnya menghasilkan peningkatan kapasitas pendapatan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mencerminkan semakin besarnya kebutuhan layanan jasa pemerintah, sehingga dibutuhkan anggaran pemerintah yang semakin besar pula (Mahyuddin, 2009). Pendapatan per kapita berkontribusi terhadap PAD sehingga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Pengkajian atas hasil – hasil penelitian sebelumnya akan sangat membantu peneliti-peneliti lainnya dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan berbagai pendekatan spesifik. Selain itu, dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi peneliti. Oleh karena itu di bagian berikut akan diterangkan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu: Penelitian yang dilakukan Santosa (2013) yang berjudul “Pengaruh PAD dan Dana perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAU, DAK, DBH, PAD, Pengangguran, Kemiskinan dan Pertumbuhan dan alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan, sementara DAK dan DBH berpengaruh. PAD dan DAU berpengaruh terhadap penurunan pengangguran sementara DAK dan DBH tidak. PAD, DAU, DAK, DBH berpengaruh menurunkan angka kemiskinan, sementara pertumbuhan tidak berpengaruh pada kemiskinan dan pengangguran. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengidentifikasi PAD memengaruhi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi

memengaruhi kemiskinan dan menggunakan teknik analisis yang sama yaitu analisis jalur. Sementara perbedaannya adalah lokasi penelitian yang ini pada 33 Provinsi yang ada di Indonesia sedangkan lokasi yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan variabel belanja tidak langsung yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, dkk. (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh)”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, sementara DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur dan menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara perbedaannya adalah variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini yaitu belanja modal sedangkan yang digunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dan lokasi yang digunakan berbeda yaitu Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini menggunakan Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi

dan alat analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Hasil analisis menunjukkan belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara perbedaannya adalah lokasi penelitian ini di Jawa Tengah tahun 2007-2011, sedangkan yang digunakan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2013.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat meningkatkan Belanja Modal dan akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan dari landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif karena didasarkan pada data kuantitatif atau temuan-temuan yang dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (Rahyuda dkk, 2004:7). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma asosiatif. Peneliti

akan melakukan eksperimen untuk mengetahui hubungan beberapa variabel yaitu pengaruh langsung variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh langsung pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal serta pengaruh tidak langsung dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal di Provinsi Bali selama periode 2007-2013.

Lokasi penelitian dilakukan Provinsi Bali yang dibagi menjadi 9 Kabupaten/Kota dengan menggunakan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan obyek-obyek penelitian. Dipilihnya lokasi ini karena Bali memiliki potensi yang besar dari segi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pariwisata dan masih tergantung terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk penyediaan barang publik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga variabel utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2013.

Variabel Terikat (*dependent variabel*) (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan Ekonomi (Y_2) yaitu adalah perubahan relatif nilai riil Produk Domestik Bruto (PDRB) di Provinsi Bali tahun 2007-2013 atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam satuan persen.

Variabel Bebas (*independent variabel*) (X), yaitu variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya atau variabel yang memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pendapatan Asli Daerah (X_1) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang dibagi jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007-2013 dinyatakan dalam satuan ribu rupiah per penduduk. Dana Perimbangan (X_2) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dana yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan satuan ribu rupiah per penduduk..

Variabel Intervening adalah variabel yang memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen (Suyana Utama, 2008:156). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Belanja Modal (Y_1) merupakan belanja yang terkait dengan pemenuhan infrastruktur secara langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada satu periode anggaran yang dikeluarkan guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat pada dinyatakan dalam satuan ribu rupiah per penduduk.

Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2002:13). Dalam hal ini data kuantitatif

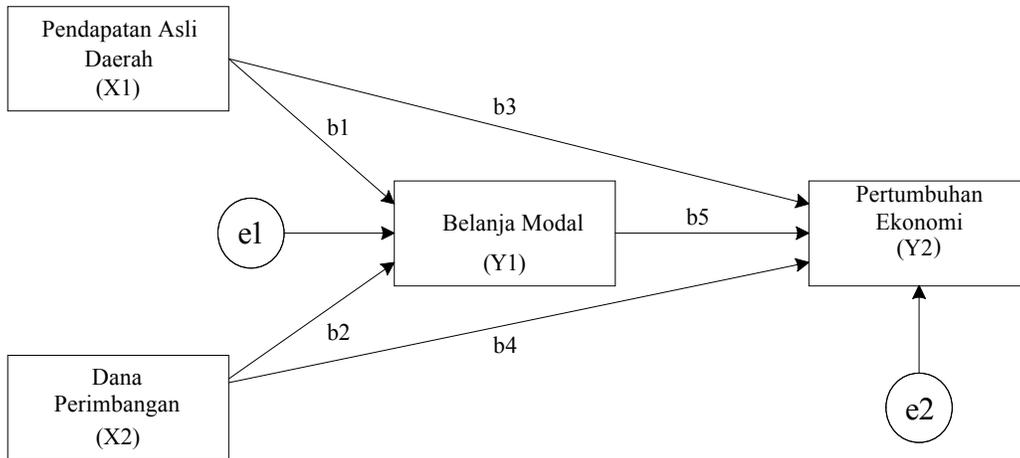
yang digunakan adalah data realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Data Kualitatif merupakan data yang berupa penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian (Sugiyono, 2002:14). Dalam penelitian ini yang berupa data kualitatif yang digunakan adalah teori mengenai pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Berdasarkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sugiyono, 2013). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu adalah data realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, data realisasi Dana Perimbangan, data realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan jumlah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007 sampai dengan 2013.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki. (Wirawan, 2002:110). Sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang terdapat pada tahun 2007-2013 mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal serta pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota. Tahun 2007-2013 dipilih karena ketersediaan data mengenai belanja modal. Belanja modal baru mulai ada sejak tahun 2007 karena sebelumnya termasuk ke dalam belanja tidak langsung bernama belanja pembangunan.

Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan metode observasi non partisipan yang berarti pengumpulan data dengan observasi/pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2007:204). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan dokumen – dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS, *browsing*, dan buku-buku literatur tentang pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Penelitian ini diajukan sebagai penelitian empiris untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel dalam analisis jalur ditunjukkan oleh anak panah (Suyana Utama, 2012:156). Pengujian hubungan kausal dalam analisis jalur didasari pada teori yang

memang menyatakan bahwa variabel yang dikaji memiliki hubungan secara kausal.



Gambar 1. Metode Analisis Jalur Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali

Berdasarkan gambar 1 dapat dibuat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (2)$$

$$Y_2 = b_3 X_1 + b_4 X_2 + b_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

Y_1 = Belanja Modal

Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi

e_1, e_2 = variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu : (a) pengujian pengaruh langsung, yakni pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap

pertumbuhan ekonomi, pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta (b) Pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana perimbangan melalui belanja modal, yang diuji dengan menggunakan uji Sobel. Hasil persamaan struktural 1 dan struktural 2 dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 3.
Hasil Ringkasan Kosefisien Jalur dan Signifikansi Antarvariabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	0.539	0.002	5.602	0.000	Signifikan
X2 → Y1	0.382	0.006	3.970	0.000	Signifikan
X1 → Y2	0.612	0.004	3.181	0.002	Signifikan
X2 → Y2	0.388	0.006	3.966	0.000	Signifikan
Y1 → Y2	0.084	0.012	-0.434	0.666	Tidak Signifikan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.539 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y_1). Hubungan positif signifikan antara pendapatan asli daerah dan belanja modal ini sesuai dengan hukum Wagner. Apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga meningkat (Mangkoesobroto, 1993:171). Hasil penelitian ini juga didukung oleh Darwanto dan Yustikari (2007) maupun Dwirandra (2013) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan pengaruh langsung dana perimbangan terhadap belanja modal. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.382 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya dana perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y_1). Hubungan positif dan signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja modal yang diperoleh dalam penelitian ini, sesuai dengan Holz-Eakin et al (1994), menyatakan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara transfer di pemerintah pusat dengan belanja dipemerintah daerah.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.612 dan nilai probabilitas sebesar $0.002 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2). Hubungan positif dan signifikan dalam penelitian ini sesuai dengan teori Peacock dan Wisman yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pungutan pajak semakin meningkat dan mengakibatkan penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (Mangkoesebroto 1993:173).

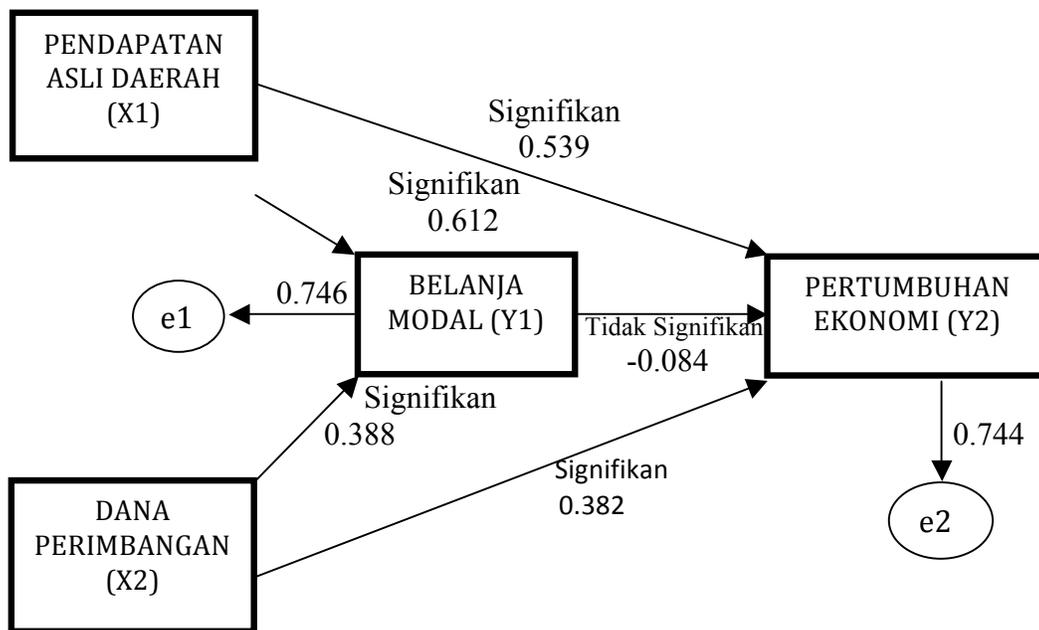
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan pengaruh langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.388 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya dana perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2). Hubungan positif dan signifikan antara variabel dana

perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan Menurut Holz-Eakin et al (1994), menyatakan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara transfer di Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dengan Belanja di Pemerintah Daerah. Sesuai dengan tujuan dari dana perimbangan yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.084 dan nilai probabilitas sebesar $0.666 > 0.05$ ini berarti H_0 diterima H_1 ditolak, artinya belanja modal (Y_1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2). Rata-rata belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan, namun hanya di tahun 2010 rata – rata belanja modal mengalami penurunan. Berkurangnya rata – rata alokasi belanja modal pada tahun 2010 tidak diikuti dengan penurunan rata – rata penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena besarnya alokasi belanja langsung yang konsumtif dengan belanja tidak langsung untuk kepentingan publik yang tidak berimbang, sehingga tingginya belanja modal yang diharapkan belum mampu memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hubungan negatif dan tidak signifikan sesuai dengan penelitian Fitriyanti dan Pratolo (2007) dan Muharni (2008) bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, hipotesis ini tidak mendapat dukungan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Suyana Utama, 2012).



Gambar 2. Diagram Hasil Analisis Jalur

Sumber: data sekunder diolah, (2015)

Pengujian pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal dapat dilihat melalui nilai z dari koefisien β , yang diperoleh dengan menghitung S terlebih dahulu.

Tabel 4.
Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Antar Variabel	Variabel Mediasi	Z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	-0.58	Tidak Signifikan
X2 → Y2	Y1	-0.343	Tidak Signifikan

Oleh karena Z hitung sebesar $-0.58 < -1.64$. Artinya belanja modal (Y_1) bukan merupakan variabel intervening dalam pendapatan asli daerah (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) di Provinsi Bali. Oleh karena Z hitung sebesar $-0.343 < -1.64$. Artinya belanja modal (Y_1) bukan merupakan variabel intervening dalam dana perimbangan (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2) di Provinsi Bali.

Nilai pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal sebesar $-0,051$ mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah melalui belanja modal adalah sebesar negatif 5,1 persen. Nilai pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal sebesar $-0,032$ mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung dana perimbangan melalui belanja modal adalah sebesar negatif 3,2 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu (a) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. (b) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. (c) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi bali

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran yaitu (a) Peningkatan pendapatan asli daerah sangat diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja daerah untuk penyediaan infrastruktur. Daerah karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat menandakan perekonomian daerah tersebut semakin baik. Selain itu, belanja modal lebih diarahkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan daerah akan infrastruktur publik sehingga mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya agar tujuan dari belanja modal yaitu mensejahterakan masyarakat agar tercapai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. (b) Peningkatan dana perimbangan yang diperoleh suatu daerah harus diimbangi dengan pemasukan daerah lainnya. Setiap dana yang diperoleh dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperoleh dikelola secara baik dan di alokasikan sesuai dengan kebutuhan dari daerah melalui belanja daerah. (c) Pentingnya pengalokasian pendapatan asli daerah dan dana perimbangan melalui belanja modal yang tepat sasaran sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Walau belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peran dana tersebut sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan belum dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi bila belum terjadi pengalokasian yang tepat untuk belanja daerah.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali . 2008. *Bali Dalam Angka*. Bali.

----- . 2009. *Bali Dalam Angka*. Bali.

----- . 2010. *Bali Dalam Angka*. Bali.

----- . 2011. *Bali Dalam Angka*. Bali.

----- . 2012. *Bali Dalam Angka*. Bali.

----- . 2013. *Bali Dalam Angka*. Bali.

----- . 2014. *Bali Dalam Angka*. Bali.

Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, *Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol. 49. Pg. 1

Mangkoesebroto, Guritno. 2001, *Ekonomi Publik*. BPFE UGM Yogyakarta.

Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syah Kuala.

Rahyuda, Ketut, I Gusti Murjana Yasa dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodelogi Penelitian*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Santosa, Budi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2 Juli 2013.

Subandi.2008. *Ekonomi Pembangunan*.Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

-----, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2013. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No. 2 Desember 2010.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.

Suyana Utama, Made. 2008. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.

Wirawan, Nata. 2002. *Statistik 2 (Statistik Inferensial)*. Edisi Kedua. Denpasar: Keraras Emas.

Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. 799-816 .